

INDONESIA DAN REJIM BARU PROTOKOL PERUBAHAN IKLIM

Raden Mohammad Marty M. Natalegawa

Duta Besar RI untuk PBB, New York

Konferensi Perubahan Iklim ke-13 di Bali, Desember 2007 telah menoreh keberhasilan Indonesia dalam sejarah negosiasi perubahan iklim. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah membawa masyarakat internasional untuk menyepakati pembahasan kerangka baru perjanjian perubahan iklim paska 2012. Catatan kesuksesan ini akan selalu menjadi rujukan diplomasi Indonesia. Kepemimpinan Indonesia tidak berhenti hanya pada keberhasilan Konferensi Bali, namun terus dilakukan untuk mengawal proses negosiasi melalui *Bali Road Map* dengan melewati Poznan untuk menuju Kopenhagen dimana diharapkan kesepakatan dapat dihasilkan.

Upaya kepemimpinan Indonesia dilakukan di berbagai forum internasional, selain tentunya di forum resmi negosiasi di bawah Konvensi Perubahan Iklim seperti pertemuan-pertemuan di Bangkok, Accra dan Bonn. Di forum PBB, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kegiatan berkaitan dengan perubahan iklim yang menjadi inisiatif Presiden Majelis Umum ke 62. Selain itu, Indonesia telah melahirkan berbagai inisiatif paska Konferensi Bali guna mempertahankan momentum dan memberikan dorongan politik yang telah tercipta agar terus diupayakan dapat berlanjut hingga tercapai kesepakatan rejim baru paska 2012 pada tahun 2009.

Troika Leaders

Salah satu inisiatif Indonesia yang perlu dicatat adalah pembentukan "*Troika Leaders* (Indonesia, Polandia, Denmark + Sekjen PBB). *Troika* tersebut dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan koordinasi di antara Kepala Negara/Pemerintahan Presiden Conference of the Parties (COP) 13 hingga COP-15 guna mendorong adanya kesinambungan peran, fokus dan agenda Presiden COP-13 hingga COP-15. Melalui *Troika* ini diharapkan dapat dikembangkan suatu strategi untuk memobilisasi dukungan dan keterlibatan pada tingkat setinggi mungkin dalam memfasilitasi proses pembahasan guna mencari solusi terhadap tantangan bagi keberlanjutan bumi ini.

Sejumlah inisiatif membangun kekuatan bersama guna mengatasi isu perubahan iklim pada tingkat kepemimpinan politik tertinggi dunia pun dilakukan. Ketiga Kepala Negara Presiden COP-13, 14 dan 15 (Indonesia, Polandia dan Denmark) pada tanggal 31 Maret 2008 menerbitkan artikel bersama di harian *International Herald Tribune* bertepatan dengan dimulainya proses negosiasi awal *Bali Road Map* di Bangkok tanggal 31 Maret - 4 April 2008.

Pada tanggal 12 September 2008 yang baru lalu, telah dilakukan *video conference* di antara *Troika Leaders* dan Sekjen PBB yang dimaksudkan sebagai forum untuk melakukan komunikasi secara langsung dan mendiskusikan perkembangan proses perundingan paska Bali. Tiga isu penting terkait perubahan iklim menjadi pokok bahasan, yaitu *pertama*, hasil pertemuan negosiasi sejak dihasilkannya *Bali Road Map* yang telah dilaksanakan di Bangkok, Bonn dan Accra; kedua, peran *Troika Leaders* dan Sekjen PBB; serta ketiga, hasil yang diharapkan pada pertemuan COP di Poznan (Polandia).

Secara garis besar hasil *video conference* cukup menggembirakan karena adanya pemahaman bersama terhadap pentingnya mempertahankan momentum, kompleksitas permasalahan dan perlunya dorongan politis agar negosiasi tetap berjalan sesuai arah dan jalur yang telah disepakati bersama di Bali. Peningkatan koordinasi antara *Troika Leaders* dan Sekjen PBB, serta pemanfaatan berbagai pertemuan tingkat tinggi untuk memobilisasi dukungan pada tingkat setinggi mungkin bagi pencapaian hasil negosiasi yang seimbang dan inklusif menjadi penting. Indonesia juga mengusulkan agar dalam konteks *Troika Leaders* dan Sekjen PBB, kerjasama-kerjasama kongkrit kiranya bisa dilakukan, diantaranya dalam bidang pembiayaan dan pengembangan teknologi pengurangan emisi akibat *deforestation* di negara-negara berkembang. Hasil pembahasan *video conference* tersebut secara tidak langsung telah memberikan eksistensi bagi kerjasama *Troika Leaders* dan Sekjen PBB.

Untuk menandai pembentukan ini, pada kesempatan sesi *High Level Debate* SMU PBB ke-63 tanggal 24 September 2008, Menlu RI Hassan Wirajuda bersama-sama dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Lech Kazynski dari Polandia dan Perdana Menteri Anders Fogh Rasmussen dari Denmark telah mengadakan konperensi pers.

Penetapan Norma

Dalam berbagai forum negosiasi di PBB, Indonesia selalu mengusung isu perubahan iklim dan keberhasilan Konperensi Bali. Perjuangan Indonesia mengupayakan kerjasama internasional di bidang alih teknologi dan pendanaan sebagai upaya bagi negara berkembang dalam melakukan pembangunan yang lebih ramah lingkungan termasuk dalam menghadapi dampak perubahan iklim, merupakan "trade mark" diplomasi Indonesia.

Menyadari bahwa upaya mitigasi dan adaptasi membutuhkan pendanaan yang sangat besar, Indonesia terus mengupayakan untuk menjembatani perbedaan pemahaman perlunya tambahan bantuan pendanaan di samping *official development assistance (ODA)* khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil dengan disepakatinya paragraf mengenai kerjasama alih teknologi dan pendanaan dalam berbagai dokumen seperti antara lain Deklarasi *Economic and Social Council*, Deklarasi Pertemuan Gerakan Non-Blok, Deklarasi *Organization of Islamic Countries* dan Deklarasi Menteri Kelompok 77 dan China.

Keterlibatan aktif Indonesia dapat pula dicatat dalam berbagai kegiatan seperti debat tematis, diskusi panel dalam mempromosikan peran PBB dalam membantu negara anggota menghadapi dampak perubahan iklim. Indonesia mendukung penyelenggaraan *High Level Thematic Debate* mengenai perubahan iklim pada tanggal 11-13 Februari 2008 yang mengangkat kemitraan global dan koherensi sistem PBB dalam mengatasi isu perubahan iklim.

Di samping itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung perlunya keterlibatan sektor swasta dalam mencari solusi terhadap upaya negara-negara mengurangi ketergantungan pada *fossil fuels*. Pandangan sektor swasta, sebagai pemain utama dalam pasar karbon, akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan rejim baru paska 2012. Peran sektor swasta dengan peraturan pemerintah yang sesuai akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat internasional dalam melaksanakan kerjasama internasional guna menghadapi pemanasan global.

Kegiatan penting lainnya adalah penyelenggaraan pertemuan PBB khususnya dalam membantu negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti negara kepulauan-kepulauan kecil (*Small Island Developing Countries*). Kesamaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga telah merasakan dampak perubahan iklim seperti naiknya air laut, *bleaching of coral reefs* yang akan mengurangi tangkapan

ikan bagi para nelayan, dan hilangnya hutan-hutan mangrove yang sangat bermanfaat bagi upaya adaptasi.

Friends of Climate

Keaktifan Indonesia dapat pula dicatat dari keterlibatan Indonesia dalam "*Friends of Climate*" yang lebih merupakan "like-minded group" dari negara-negara yang mempunyai kepentingan bersama. Beranggotakan 25 negara dan Komisi Eropa, kelompok ini dibentuk atas inisiatif Inggris setelah meluncurkan tema pembahasan "*Energy, Security and Climate Change*" pada debat Dewan Keamanan PBB, 2007.

Berbagai kegiatan *Friends of Climate* telah meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas isu perubahan iklim, serta keterkaitannya pada pembangunan berkelanjutan. Indonesia sendiri aktif terlibat memberikan kontribusi dalam memformulasikan surat dari *Friends of Climate* kepada Sekjen PBB agar kegiatan operasional badan-badan di bawah sistem PBB memberikan perhatian pada isu perubahan iklim. Peran Sekjen PBB diharapkan akan semakin meningkatkan koordinasi bagi kegiatan-kegiatan operasional badan-badan PBB khususnya dalam membantu negara-negara anggota yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sekjen PBB kemudian menyatakan prioritas program badan-badan di bawah sistem PBB akan difokuskan pada lima (5) elemen dari perubahan iklim yaitu mitigasi, adaptasi, alih teknologi, pendanaan dan pengurangan deforestasi di negara-negara berkembang.

G8 Hokkaido dan *Major Economies Meeting*

Pengakuan terhadap kepemimpinan Indonesia di bidang perubahan iklim juga datang dari negara-negara besar yang tercakup dalam Group 8 (G8). Untuk pertama kalinya, Indonesia diundang hadir pada Konperensi Tingkat Tinggi G8 di Hokkaido (Jepang) bersama-sama dengan India, China, Brazil, Afrika Selatan, Meksiko, Australia dan Korea Selatan. Indonesia juga memberikan kontribusi pada Pertemuan Puncak *Major Economies Meeting* (MEMs) yang merupakan inisiatif Amerika Serikat dan diselenggarakan secara *back-to-back* dengan KTT G8.

KTT G8 di Hokkaido menghasilkan kesepakatan mengenai komitmen politik untuk mengurangi emisi jangka panjang sebesar 50% pada tahun 2050. Bagi sebagian pengamat, komitmen politik ini dipandang sebagai suatu

keberhasilan membawa negara-negara maju memberikan target pengurangan emisi pada jangka panjang. Namun demikian, KTT G8 belum berhasil menyepakati "base-year" pengurangan emisi. Isu krusial ini menjadi potret kurangnya peran kepemimpinan negara maju dalam mengurangi pemanasan global. Masyarakat ilmiah mengharapkan pengurangan emisi negara-negara maju sebesar 50% pada 2050 dan 20% pada 2020 dilakukan dari emisi yang dikeluarkan pada tahun 1990, agar temperatur bumi tidak naik melebihi 2 derajat Celcius. Dari perspektif negara maju, target pengurangan ini akan sangat merugikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masa datang.

Dalam pertemuan MEMs negara-negara penghasil emisi, baik negara maju maupun berkembang, telah menunjukkan komitmen pada tingkat tertinggi untuk mendorong proses perundingan *Bali Action Plan* sebagai dasar komitmen paska Protokol Kyoto.

Walaupun pertemuan MEMs di Hokkaido tersebut tidak dapat menyepakati pengurangan kuantitas emisi, namun beberapa negara seperti China, Korea Selatan serta beberapa *major economies* termasuk Indonesia telah menyampaikan komitmen domestik dalam mengurangi emisi. Indonesia, seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menerapkan kebijakan "mix energy" dan mengurangi laju deforestasi.

Hasil lainnya yang sangat positif dari pertemuan tersebut, khususnya untuk menciptakan ekonomi berkarbon rendah, adalah adanya perhatian besar yang diberikan oleh sektor swasta negara-negara *major economies* dalam mempromosikan produk yang ramah lingkungan dan peduli terhadap perubahan iklim.

Pada Desember 2008, Indonesia akan secara resmi menyerahkan topi "President of the COP" kepada Polandia. Namun demikian, kepemimpinan Indonesia di bidang perubahan iklim tidak akan berhenti di sana. Harapan berbagai pihak terhadap peran kepemimpinan Indonesia masih akan dipercayakan pada pundak Indonesia. Dengan posisi yang sangat unik yaitu negara kepulauan dan salah satu pemilik hutan tropis terbesar, Indonesia akan menjadi tumpuan dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang lainnya. Paling tidak dalam konteks Troika, Indonesia mewakili suara negara berkembang.

Dalam konteks PBB, Indonesia bersama-sama dengan negara berkembang lainnya maupun dengan "Friends of Climate" akan terus mengupayakan solusi bagi pencapaian *Millennium Development Goals* yang saat ini mengancam negara-negara berkembang dan negara-negara miskin

karena dampak perubahan iklim. Krisis keuangan yang saat ini melanda dunia, akan menjadi satu tantangan tambahan bagi proses negosiasi perubahan iklim, mengingat perhatian dan strategi politis akan difokuskan pada bagaimana sistem keuangan dunia dapat kembali normal. Perbaikan sistem keuangan dunia akan sangat membantu masyarakat internasional dalam mengembangkan berbagai kebijakan domestik yang diarahkan pada "low carbon society."

Diplomasi Indonesia dalam isu perubahan iklim akan terus berjalan seiring dengan peran dan kepedulian nasional Indonesia terhadap isu ini. Kepemimpinan Indonesia akan dicatat sebagai kontribusi yang akan memberikan keberlanjutan hidup generasi mendatang dalam planet bumi yang sudah penuh (*a crowded planet*).



Commission of Truth and Friendship...
 akhir. Harus diakui bahwa...
 mencerminkan "keberhasilan nasional"...
 landasan hubungan bertetangga baik dan berorientasi ke depan di kelas...
 kemudian hari. Pimpinan Timor Leste berujung kali telah menegaskan tentang...
 kemauan seperti itu. Begitu pula halnya dengan Indonesia. Di manapun juga...
 tekonsiasi merupakan kesepakatan politik untuk membuka ruang negosiasi...
 Remembrance dan forging merupakan opsi yang secara politik paling...
 dimungkinkan, dibandingkan dengan solusi lain, misalnya forgetting dan

Tulisan ini telah dipublikasikan pada: *Disputasi Teoretis, BPPK Departemen Luar Negeri, Baf, 22 Mei 2008*